Kotak 2
Sistem Jasa Lingkungan Terintegrasi di Kostarika: Mandeknya suatu Insiatif Inovatif

Sebagai bagian dari proses pembentukan konsensus nasional 1998 *(Foro de Concertación Nacional)*, Komisi Jasa Lingkungan mengusulkan adanya pembayaran jasa lingkungan yang bermula dari perkebunan, perlindungan hutan, pengelolaan hutan primer dan sekunder, hutan kota, dan komponen kehutanan sistem wanatani. Meskipun jasa lingkungan masih secara kuat dihubungkan dengan keberadaan pepohonan, pelibatan sistem wanatani, area publik (untuk perlindungan dan keindahan pemandangan), dan hutan kota, skema ini memberikan opsi dengan cakupan baru serta membuka kemungkinan untuk mengembangkan sistem yang lebih inklusif.

Pemerintah mengusulkan Penilaian dan Retribusi untuk Aksi Jasa Lingkungan yang diserahkan kepada Dewan Legislatif pada November 1998 dan dimasukkan dalam rekomendasi komisi. Rekomendasi tersebut mengupas skema dengan usulan pembayaran untuk pemilik lahan dan pengguna lahan, baik publik maupun swasta, suatu usulan yang mempengaruhi kepentingan-kepentingan sektor kehutanan swasta. Rancangan tersebut juga mengusulkan pembentukan sebuah Dana Jasa Lingkungan Nasional (FONASA) untuk mengoperasikan sistem tersebut sebagai ganti peranan Dana Kehutanan Nasional (FONAFIFO). FONAFIFO menjadi lembaga dana khusus dalam FONASA, yaitu Dana Pengurangan Gas Rumah Kaca. Kedudukannya sejajar dengan dana untuk air, keragaman hayati, keindahan pemandangan, dan dana lainnya yang mungkin diadakan. Sebuah Dewan Penasehat Jasa Lingkungan juga dibentuk dengan perwakilan dari organisasi-organisasi lingkungan, Sistem Area Konservasi Nasional (SINAC), dan sektor wisata swasta sehingga diharapkan mengurangi pengaruh yang dimiliki sektor kehutanan dalam FONAFIFO.

Sektor kehutanan swasta terlebih dulu menentang rancangan ini sebelum Komisi Dewan Legislatif bertanggung jawab untuk mendiskusikan rancangan tersebut, dan ahli lingkungan, petani, dan penduduk lokal memberikan pernyataan tentang posisi mereka terhadap rancangan tersebut, .

Badan Kehutanan Nasional (ONF), dengan pengaruh kuat dari sektor kehutanan swasta, juga menolak pembentukan FONASA dan Dewan Penasehat. ONF merasa bahwa Dewan Penasehat menduplikasi fungsi-fungsi mereka. Selain itu, kurangnya keterwakilan dalam dewan, baik dari pihak para pengusaha kehutanan, petani kecil, pemilik hutan berskala kecil, maupun yang mengusahakan reboisasi dan pemilik hutan umumnya.
ONF menganggap pihak-pihak tersebut yang bertanggung jawab terhadap bagian terbesar generasi jasa lingkungan (Asamblea Legislativa, Boletin de Prensa, 19 Januari 1999).

Dewan Kehutanan Kostarika (CCF) berpendapat bahwa rancangan tersebut tidak memperbaiki UU Kehutanan 1996 dan PJL. Oleh karena itu, mereka menentang pembentukan Dewan Penasehat karena tidak akan memiliki perwakilan dari sektor kehutanan yang produktif, pemilik hutan primer dan sekunder alami dengan jumlah terbesar, dan perkebunan swasta yang sudah ada di negara tersebut (Ibid., 20 Januari 1999).

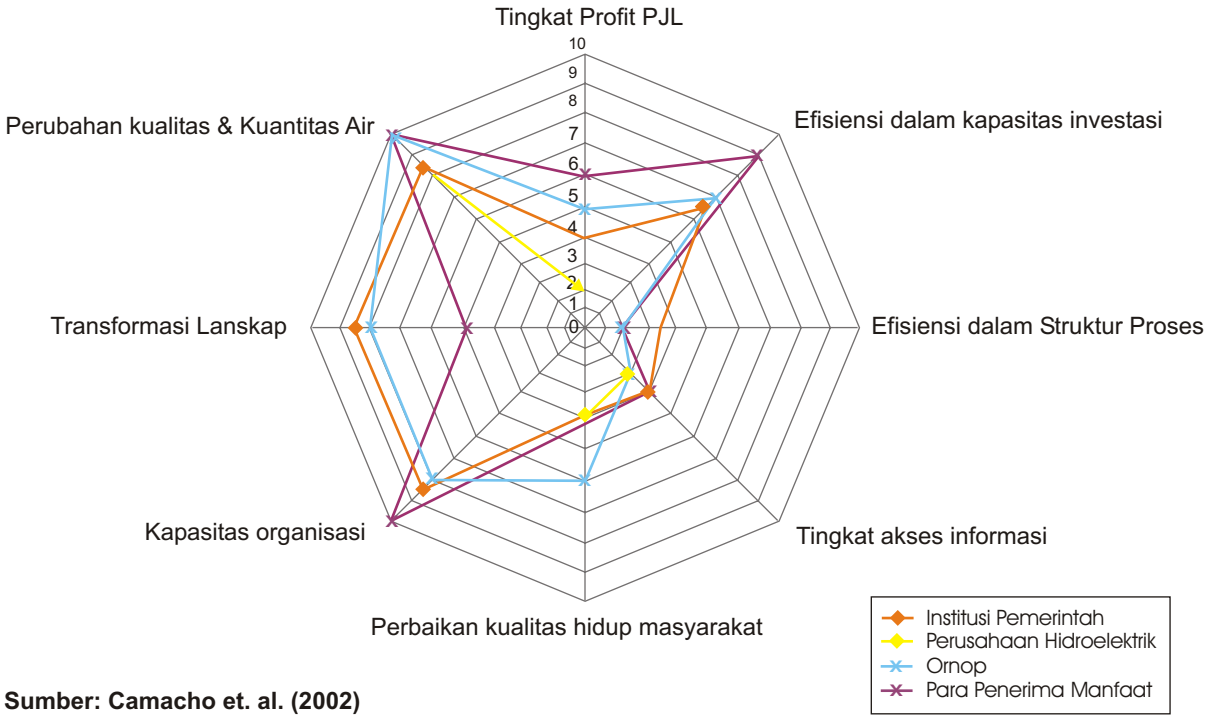
Komisi Petani Nasional (Mesa Nacional Campesina) memohon agar dana diperluas ke seluruh sektor agraria sehingga tidak hanya menguntungkan sektor kehutanan. Selain itu, mereka meminta perwakilan yang lebih besar dari berbagai sektor lainnya (Ibid., 16 Maret 1999).

Federasi Kostarika untuk Konservasi Lingkungan (FECON) menuntut partisipasi masyarakat madani dalam Dewan Pengurus FONASA dan merekomendasikan bahwa pengelolaan hutan tidak menjadi syarat dalam pembayaran terhadap jasa lingkungan (Ibid.,16 Maret 1999). Akhirnya, Komisi Urusan Pertanian dan Peternakan serta Sumberdaya Alam dari Dewan Legislatif menyetujui suatu naskah pengganti, yang secara umum, mempertahankan pengaruh sektor kehutanan swasta. Namun demikian, Menteri Kehutanan pada Mei 1999 meminta agar naskah ini tidak dikirim ke seluruh anggota legislatif dan dikembalikan untuk diskusi dalam komisi. Alasannya, karena naskah tersebut tidak secara jelas menyatakan bahwa PJL sebaiknya lebih diharapkan pada tujuan konservasi terhadap hutan primer dan bukan membantu perkembangan sektor kehutanan karena hal tersebut dibahas oleh mekanisme lain dalam UU Kehutanan.

Dalam prakteknya, Menteri menerima kritik FECON dan Komisi Petani dan Penduduk Lokal, yang menurut Surat Menteri, dilihat dalam naskah pengganti, suatu penyimpangan dari maksud semula yaitu konsep jasa lingkungan yang benar. Menteri juga merasa penting untuk memasukkan kelompok-kelompok pemerhati lingkungan ke dalam dewan pengurus FONASA agar didapat keseimbangan dalam mendefinisikan tujuan yang akan dicapai (petikan dalam Camacho et.al., 2000).

Pada akhirnya, tidak ada perubahan sehingga kerangka resmi yang ditetapkan oleh UU Kehutanan 1996 masih berlaku sampai saat ini (2003).

Gambar 2
Kostarika: Evaluasi Program PJL di Kawasan Huetar Bagian Utara



Sumber: Camacho et. al. (2002)

Dengan menggunakan analisa multikriteria, berdasarkan pada proses konsultasi yang terfokus dengan berbagai kelompok yang terlibat, Camacho et.al. (2002) mengevaluasi program PJL dan pengaruhnya secara lokal di Northern Huetar region. Seperti yang ditunjukkan oleh diagram laba-laba pada Gambar 2, skor terendah terdapat pada 'efisiensi dalam struktur proses' dan pada 'akses terhadap informasi'. Para pihak menganggap bahwa prosedur akses terhadap PJL memakan banyak waktu dan kompleks, dengan banyak persyaratan; mereka juga merasa bahwa infomasi tidak cukup disebarluaskan.

Skor tertinggi terkait dengan pengaruh PJL pada kapasitas organisasi lokal, perbaikan kualitas dan kuantitas air, dan transformasi lanskap yang positif. PJL tidak dianggap menguntungkan, kecuali pada pemilik lahan besar atau lahan pada kemiringan tinggi yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan selain kehutanan. Oleh karenanya terdapat nilai tinggi pada pengaruh positif yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sebagian menjelaskan ketertarikan produsen berpartisipasi dalam program PJL dan menginvestasikan sumberdaya yang diperoleh secara efisien. Camacho, et.al. (2002) menyimpulkan bahwa untuk produsen skala kecil, produktivitas PJL tergantung pada kesesuaiannya dengan pertanian, wisata, produk non kayu, dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya diimplementasikan wanatani dan pengelolaan jasa lingkungan secara terintegrasi.

PJL UNTUK PRODUSEN DI SARAPIQUI

Selama 1997-2000, program PJL melibatkan 12.495 hektar dan 164 produsen di Kota Sarapiqui dengan perkiraan investasi sekitar US$786.000. Sebagian besar area yaitu seluas 11.217 hektare masuk dalam kategori perlindungan hutan, 1.076 hektar kategori pengelolaan hutan, dan hanya 203 hektar kategori reboisasi.

Di antara produsen yang ikut berpartisipasi, terdapat pula 120 *parceleros** yang bergabung dengan CACSA (Pusat Pertanian Kota Sarapiqui) dan menerima bimbingan teknis dari FUNDECOR. FUNDECOR merupakan sebuah ornop yang terlibat dalam proyek PJL lainnya dengan produsen skala kecil, sedang, dan besar. Perusahaan-perusahaan hidroelektrik swasta yang beroperasi di sepanjang anak Sungai Sarapiqui (Sungai Volcan dan San Pedro) juga telah menandatangani kesepakatan PJL secara sukarela untuk melestarikan kualitas dan kuantitas air untuk pembangkit hidroelektrik.

Evaluasi program di Sarapiqui memberikan hasil serupa dengan yang ditemukan pada kasus sebelumnya. Para parceleros merasa bahwa PJL tidak begitu menguntungkan dan kerangka institusionalnya tidak begitu efisien namun mereka menghargai informasi dan pelatihan yang diterima dalam kegiatan-kegiatan kehutanan. Mereka juga merasa bahwa PJL membantu memelihara kuantitas dan kualitas air. Selain itu, mereka beranggapan bahwa program ini memperbaiki standar hidup mereka.

Pengalaman ini, yang melingkupi kepentingan-kepentingan proyek pembangkit listrik tenaga air, menunjukkan bahwa janji pembayaran jasa lingkungan dengan mengatasnamakan proyek-proyek tersebut tidak selalu menjadikan skema tersebut dapat terus berjalan. Hal ini disebabkan banyak pihak, terutama penduduk lokal, yang memiliki visi alternatif sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam.

Sebagai contoh, Perusahaan Utilitas Publik Heredia (ESPH) ingin membangun sebuah pusat pembangkit listrik tenaga air (La Virgen) untuk menghasilkan 30 MW dengan menggunakan 42 m3/detik dari Sungai Sarapiqui dan 8 m3/detik dari Sungai Poza Azul. Rencana Daya Nasional Lembaga Listrik Kostarika juga melibatkan 13 proyek baru untuk lembah Sungai Sarapiqui. Minat para pemain eksternal terhadap sumberdaya alam pada suatu kawasan yang kaya akan sumberdaya alam namun dengan tingkat kemiskinan tertinggi di negara tersebut, menimbulkan konfrontasi antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap penggunaan sungai untuk pembangkit listrik tenaga air.

Menurut FUNDECOR, ICE, MINAE, ESPH, dan perusahaan hidroelektrik lainnya, mereka mempertahankan pemanfaatan sungai berkelanjutan. Pada sisi lain, Asosiasi Kesejahteraan Sarapiqui (ABAS) membuka jalan bagi posisi kota dengan dukungan dewan wisata lokal, Jaringan Cadangan Alam Pribadi *(Red de Reservas Privadas)*, asosiasi-asosiasi pemgembangan, dan lain-lain menentang penggunaan Sungai Sarapiqui untuk hidroelektrik. Mereka merasa bahwa perubahan pada aliran sungai akan memberikan pengaruh negatif terhadap keragaman hayati lembah, wisata, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Pada akhirnya, kebuntuan tersebut untuk sementara terpecahkan pada 2000 melalui plebisit (suatu mekanisme yang digunakan untuk pertama kalinya di Kostarika) yang menolak pembuatan dam dan mendeklarasikan Sungai Sarapiqui sebagai monumen nasional. Sungai Sarapiqui dijadikan bentuk kawasan lindung yang dimiliki pemerintah setempat. Selain itu, koridor biologi dibuat antara Cadangan Alam Biologi La Selva dan Sungai San Juan dengan batas Nikaragua sebagai bagian dari Koridor Biologi Mesoamerika.

PENILAIAN DAN PELAJARAN

Camacho, et.al. (2002) dalam penilaiannya terhadap sistem PJL nasional Kostarika menekankan bahwa sistem tersebut berjalan. Sebuah kerangka institusional publik ada pada tempatnya, mampu memandu, mengkoordinasi, mendorong, dan mengendalikan proses. Terdapat sebuah sumber pendanaan melalui pajak bahan bakar. Pembayaran untuk jasa lingkungan menggunakan prosedur yang telah ada dan pengelolaannya terdesentralisasi melalui SINAC, dengan peran mediator yang

* Pemilik lahan kecil sebagai penerima keuntungan dari program reformasi lahan.

signifikan oleh ornop daerah, organisasi lokal, dan organisasi perdagangan. Sudah ada pengembangan sumberdaya manusia dan mekanisme administrasi, keuangan, dan teknikal yang diperlukan.

Kedua, PJL mendorong perkembangan, tidak hanya regenerasi penutupan hutan dan penggunaan efisien terhadap sumberdaya alam, namun juga proses-proses inovasi sosial dalam sektor lingkungan dan kehutanan serta kepengurusan lokal. Instrumen baru dan model-model PJL muncul mengiringi kerangka aturan resmi. Kapasitas daerah tingkat dua, setingkat kabupaten untuk menanggung pengelolaan lingkungan lokal mulai berkembang.

Usaha-usaha asosiatif untuk menghubungkan berbagai kepentingan semakin kuat. Ornop, produsen, dan perusahaan semakin bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka menjadi sadar tentang perlunya menghargai sumberdaya alam serta melakukan investasi dalam pemulihan atau perlindungan sumberdaya alam untuk mengamankan kepentingan pribadi dan masyarakat. Inovasi teknis muncul seperti dalam produksi kayu dimana penebangan tradisional telah berkembang menjadi pengelolaan hutan berkelanjutan dan reboisasi.

Camacho, et.al. (2002) menyoroti beberapa kelemahan. Visi yang terpecah dalam proses penilaian jasa lingkungan. Kurangnya informasi yang memadai sehubungan dengan PJL. Tumpang tindih dan terpisahnya pendekatan dan strategi sektoral (lingkungan, pertanian, energi, wisata) dalam suatu teritorial yang ada. UU yang terbagi-bagi. Usaha-usaha yang jarang melibatkan tingkat kabupaten dan tidak memperkuat kapasitas serta kompetensi mereka dalam masalah lingkungan. Persepsi berbagai pihak bahwa jumlah yang dibayarkan rendah, jarang memberikan motivasi, tidak mendatangkan keuntungan, dan proses administrasinya panjang serta berbelit-belit.

Dihadapkan pada berbagai keterbatasan tersebut, Camacho, et.al. (2002) mengajukan perbaikan koordinasi antar sektoral dan antar institusional, mengatasi hukum yang terbagi-bagi, dan inovasi dalam kriteria yang digunakan untuk mengurus PJL. Diusulkan suatu gerakan menuju penilaian lingkungan yang integral dan pembedaan untuk tiap kawasan atau lokasi. Disarankan pula pengembangan kriteria konsensus dari perspektif pengelolaan pengembangan lokal dan penguatan wewenang pemerintahannya dalam masalah lingkungan dan penyediaan jasa publik. Selain itu, dianggap penting juga untuk memperkuat kapasitas bisnis, kabupaten, institusi, dan organisasi akar rumput untuk menginstitusionalkan proses perencanaan partisipatif untuk pengelolaan lingkungan kawasan mikro.

Mereka menganggap bahwa mengembangkan akses dan mekanisme distribusi, termasuk perbedaan skala pembayaran, akan memberikan pengaruh positif yang besar terhadap kualitas kehidupan para petani kecil dan penduduk lokal. Peningkatan kemampuan mendatangkan keuntungan bagi PJL dan dapat memberikan kontribusi pada perbaikan-perbaikan tersebut. Hal ini dapat dicapai jika PJL dikaitkan untuk memajukan perluasan kegiatan produksi yang menjadi kepentingan produsen seperti wanatani, agro wisata atau ekowisata, produk-produk non kayu, integrasi rantai produksi, dan pasar yang aman.

Beberapa pengamatan dan rekomendasi tersebut mendapat pertimbangan lebih besar ketika dikaji menurut situasi sosial yang lebih buruk pada masyarakat pedesaan di Berbagai negara Amerika lainnya. 8,9% populasi penduduk desa Kostarika hidup dalam kemiskinan yang menakutkan pada 2001 dan 16,3% tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya *(Octavo Informe Estado de la Nacion, 2002)*. Keadaan yang lebih buruk terjadi di sebagian besar negara-negara lainnya yang memiliki mekanisme lebih lemah dibandingkan Kostarika dalam membantu kawasan pedesaan yang tidak diprioritaskan. Dengan kondisi ini, yang mungkin menjadi sebuah kesalahan strategis di Kostarika yaitu penolakan terhadap sistem PJL karena tidak dipandang sebagai suatu instrumen untuk mengurangi kemiskinan pedesaan atau mendorong berkembangnya pembangunan lokal. Dalam konteks lain dan dengan logika

yang sama, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Selain yang telah dikemukakan sebelumnya, pengalaman Kostarika menurut pandangan masyarakat miskin pedesaan, menunjukkan pelajaran yang berarti. Sebagai contoh, kasus Platanar dan Sarapiqui menunjukkan bahwa pelibatan para petani kecil dalam skema PJL dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas kehidupan mereka dan terhadap dinamika masyarakat pedesaan dimana skema tersebut dijalankan. Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari PJL rendah namun menunjukkan sebuah tambahan ekonomi dan dalam proses, produsen yang berpartisipasi mengakui adanya keuntungan lain dari hubungan mereka dengan organisasi-organisasi pendukung seperti pelatihan (teknis, organisasi, keuangan, pemasaran) untuk pengelolaan kehutanan.

Pada saat bersamaan, penghargaan penduduk lokal meningkat terhadap nilai sumberdaya alam yang dimiliki dan memperkuat modal sosialnya. Mereka juga akan mencoba untuk meningkatkan kendali terhadap penggunaan lingkungan lokal. Meskipun hal ini dapat menimbulkan konflik sosial lingkungan, seperti di Sarapiqui, namun ketika banyak pihak setempat memiliki kapasitas kepengurusan lingkungan lokal lebih besar dan pemahaman lanskap lebih baik, maka terbuka peluang untuk menghasilkan strategi dan mekanisme PJL yang mengutamakan prioritas dan kebutuhan lokal.

Pengalaman di Kostarika juga menekankan pentingnya orientasi menyeluruh dari skema dan aturan dasarnya untuk menentukan kapasitasnya agar komprehensif. Dengan meluasnya kemiskinan pedesaan, menjadi lebih penting untuk memastikan bahwa orientasi mekanisme dan aturan dasar ditetapkan dalam cara yang tepat sehingga memungkinkan untuk perkembangan secara simultan dalam memperkuat mata pencaharian pedesaan dan pengelolaan sumberdaya alam.
Dalam beberapa konteks, hal ini berarti melihat bidang lain selain hutan dan kepentingannya, untuk lebih secara langsung dihubungkan dengan kegiatan produktif lainnya yang menekankan pada penguatan strategi penghidupan masyarakat pedesaan. Fokus yang luas terhadap penyediaan jasa lingkungan dan kompensasi yang mengidentifikasikan berbagai praktek dalam penyediaan jasa lingkungan dapat menjadi sebuah instrumen penting untuk memperbaiki, mendiversifikasi, dan memperkuat strategi produktif bagi produsen dan masyarakat.

MEKSIKO[10]

Dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lainnya, aspek yang paling menonjol dari konteks Meksiko yaitu luasnya akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam oleh para petani dan penduduk lokal. Mereka mengontrol lebih dari setengah lahan dan 80% hutan negara. Kondisi ini merupakan warisan Revolusi Meksiko dan UU 1971 Pasal 27 yang saat ini masih berpengaruh dan menetapkan kepemilikan publik atas sumberdaya alam (lahan, lapisan tanah, dan air teritorial), kekuasaan negara untuk menentukan lahan milik sosial (*ejidos** dan lahan komunal penduduk lokal), dan lahan milik pribadi. Pasal 27 diamandemen pada 1992 untuk memungkinkan penjualan bidang ejido namun ejido yang merupakan area semi kolektif, terutama lahan dengan hutan, tetap dipertahankan (Burstein, et.al., 2002).

Konteks ini mendukung insiatif-inisiatif yang bertujuan untuk memberi nilai tambah terhadap jasa lingkungan dan memberikan keuntungan kepada, penduduk lokal dan petani, terutama jika kita mempertimbangkan suplai potensial jasa lingkungan. Menurut Burstein, et.al. (2002), Meksiko memiliki sebuah potensi besar untuk rosot karbon. Keragaman genetik terhitung 10% dari total dimiliki bumi juga menunjukkan jasa lingkungan yang penting.

[10] Sintesis pengalaman di Meksiko ini berdasarkan Burstein, et.al. (2002).
* Dalam Bahasa Meksiko,lahan yang diambil alih yang direalokasikan oleh pemerintah untuk suatu kelompok pekerja (Kamus Kecil Bahasa Spanyol Collins, HarperCollins, 2002).

Meksiko memiliki atraksi alam yang luar biasa sehingga apresiasi terhadap lanskap melalui ekowisata menunjukkan peluang yang menjanjikan bagi penduduk lokal. Jasa lingkungan hidrologi secara luas diakui penting walaupun para pengguna masih merasa bahwa jasa tersebut semestinya cuma-cuma atau disubsidi.

INISIATIF PJL DAN MASYARAKAT PEDESAAN: TIGA KASUS

Dengan latar belakang tersebut, Burstein, et.al. (2002), di bawah Proyek PRISMA-Ford, menggali isu PJL di Meksiko dengan tiga studi kasus yang mempelajari keterlibatan masyarakat pedesaan dalam rosot karbon, keragaman hayati, dan ekowisata.

ROSOT KARBON: DANA BIOKLIMAT

Dana Bioklimat *(Fondo BioClimático)* ditetapkan pada 1997 untuk mengurus pendanaan Scolel Te, sebuah proyek percontohan rosot karbon yang terbentuk dari kolaborasi organisasi petani, Serikat Kredit Pajal Ya kac'tic (PAJAL), the Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), dan Universitas Edinburgh (Inggris). Lebih dari 300 petani kopi dan petani jagung ikut serta dalam proyek ini. Mereka menanam rata-rata satu dari empat hingga lima hektar bidang lahan milik mereka sendiri dengan pepohonan untuk rosot karbon.

Pada 1997, Federasi Mobil Internasional membeli 5.500 ton karbon yang pertama diperhitungkan terhadap emisi global per tahun dengan harga US$10 per ton (kemudian meningkat menjadi US$12). Pembayaran dilakukan dalam tiga bagian selama 10 tahun berdasarkan komitmen 20 tahun. Sebagian dari jumlah ini menutupi pengeluaran untuk bimbingan teknis dan administrasi yang diadakan oleh AMBIO dengan kerjasama profesional.

Pembayaran untuk rosot karbon merupakan pendapatan minimum bagi para petani. Namun insentif ini didukung sejumlah peluang untuk menembus pasar kayu yang diproduksi dengan menerapkan praktek kehutanan berkelanjutan dan mengintegrasikan rosot karbon ke dalam strategi lainnya seperti produksi kopi organik dan inisiatif agroekologis lainnya.

Para peserta juga mendapatkan keuntungan berupa bimbingan untuk merencanakan agroekosistem, yang diadakan oleh AMBIO melalui Plan Vivo. Bimbingan ini memberikan orientasi bagi para penanam dan memungkinkan pengawasan fiksasi karbon dengan menggunakan strategi yang mereka pilih. Para penanam yang ikut serta dalam proyek rosot karbon telah menunjukkan kapasitasnya untuk mengelola sumberdaya dan memelihara kekompakannya namun mereka juga mengalami konflik dengan komunitas lain yang ada di tempat mereka bekerja.

KERAGAMAN HAYATI DAN ROSOT KARBON: UZACHI (OAXACA)

Pengalaman UZACHI (Perserikatan Masyarakat Zapotec-Chinantec) dimulai pada saat adanya gerakan untuk mendapatkan kembali kontrol atas penggunaan hutan pada lahan masyarakat. Di kemudian hari, gerakan berubah menjadi kehutanan masyarakat dan baru-baru ini ditambah dengan jasa lingkungan keragaman hayati dan rosot karbon. Selama proses, UZACHI telah dibimbing oleh ERA (Studi Pedesaan dan Badan Penasehat Petani).

Lahan seluas 26.112 hektar yang dikontrol oleh empat komunitas anggota UZACHI secara kolektif dijalankan di bawah Rencana Pengelolaan Hutan dan Rencana Tata Guna Lahan dikembangkan dengan cara partisipatif. Rencana-rencana ini membagi area-area berbeda untuk perlindungan keragaman hayati, tanah dan air, produksi yang menghasilkan pendapatan (kayu), dan pertanian subsisten (gandum dan jagung).

Pengembangan persediaan jasa lingkungan berfokus pada penelitian sumberdaya hayati dan rosot karbon. Studi tentang sumberdaya hayati mendukung diversifikasi hasil panen melalui penanaman jamur, anggrek, dan tanaman hias lainnya. Selain itu, di bawah kontrak tiga tahun untuk riset tanaman obat dengan SANDOZ (NOVARTIS), yang ditanda-

Tangani pada 1995, UZACHI melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan dan laboratorium. Sedangkan SANDOZ membiayai sebuah laboratorium, staf terlatih, membayar jasa-jasa yang disediakan, dan suatu paket biaya kepada UZACHI atas partisipasinya jika sebuah produk dengan aplikasi pengobatan baru ditemukan. Sebagai catatan bagi penulis, pengalaman ini menunjukkan tentang cara memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan menstimulasi pelestarian area-area hutan sekaligus mendorong kemajuan ilmu pengetahuan.

UZACHI dan IXETO (Persatuan Masyarakat Ixtlan-Etla, Oaxaca) bersama dengan dua organisasi sipil, ERA dan CCMSS (Dewan Masyarakat Meksiko untuk Kehutanan yang Berkelanjutan), menyusun sebuah proposal untuk menetapkan 836.000 ton karbon selama 30 tahun dengan menerapkan sistem silvikultur dan agrosilvikultur. Proyek tersebut bertujuan untuk menstabilkan batas pertanian, meningkatkan penutupan hutan, dan penggunaan kayu bakar secara lebih efisien. Perkiraan biaya modal US$6 per ton akan menghasilkan pendapatan bersih sebesar 40% berdasarkan harga US$10 per ton. Mereka memang belum menjual karbon namun mereka menjelajahi pasar di kota-kota besar di negara tersebut, terutama Meksiko.

EKOWISATA: MAZUNTE DAN VENTANILLA, OAXACA; SELVA DEL MARINERO, VERACRUZ

Di Mazunte, setelah pemerintah mengeluarkan sebuah larangan penangkapan penyu, masyarakat mencari alternatif sumber pendapatan. Pada 1992, pemerintah menetapkan sebuah Cadangan Ekologis Petani seluas 14.000 hektar dan Asosiasi Pemilik Bersama yang menerima konsesi atas area permukaan laut. Tujuh tahun kemudian, Mazunte memiliki 400 tempat tidur, 12 restoran, sebuah hotel kecil, 30 buah usaha di tepi pantai, dan 4 buah taksi. Sebagian besar penduduk hidup dari kepariwisataan dan sebuah pabrik kosmetik alami serta museum penyu didirikan. Namun demikian, keberhasilan ini menyebabkan terlampauinya daya dukung sehingga mengabaikan aspek konservasi.

Proyek Ventanilla dilaksanakan setelah serangan Topan Pauline (1997) ketika kerusakan dan reboisasi hutan mangrove mengarah pada usaha tambahan yaitu mengadaptasikan kawasan untuk kepentingan wisatawan dalam pengamatan burung dan buaya sekaligus menjadi kegiatan regenerasi populasinya. Asosiasi Pemilik Bersama Ventanilla mengorganisasi jasa wisatawan, pemeliharaan kawasan estuari, dan hutan mangrove. Tuntutan wisatawan yang lebih lunak di Ventanilla terlihat lebih mendukung konservasi dari pada di Mazunte.

Proyek Selva del Marinero, di ejido Lopez Mateos dalam sebuah kawasan lindung, terlaksana dengan adanya dukungan Asosiasi Proyecto Sierra Santa Marta. Pada 1997, terselenggara perjalanan wisata pertama dan saat ini menerima kedatangan sekitar 500 wisatawan per tahun, terutama yang berasal dari Meksiko. Para penyedia menunjukkan kepedulian dan perhatian yang tinggi terhadap lanskap. Mereka memisahkan sampah dan tidak lagi melakukan kebiasaan mencuci langsung di sungai. Mereka menerima pendapatan yang kecil rata-rata US$35 dalam satu tahun per orang. Pendapatan ini setara dengan 10 hari kerja. Distribusi berdasarkan pada usaha perseorangan dan tidak seimbang sehingga terjadi sejumlah konflik. Keberlangsungan proyek bergantung pada meningkatnya kedatangan wisatawan.

Proyek-proyek ekowisata tersebut memanfaatkan pendapatan untuk konservasi dan menunjukkan kelayakan isu-isu lingkungan. Meskipun kenyataannya, pasar wisata masih dapat melemahkan kelayakan tersebut sebagaimana yang terjadi di Mazunte. Di Ventanilla dan Selva del Marinero, dengan kedatangan wisatawan yang rendah, malah lebih mampu melindungi lanskap. Sayangnya, rendahnya tingkat pendapatan mereka masih perlu dipertanyakan. Ketidakseimbangan distribusi pendapatan yang terjadi karena kurangnya keterlibatan berbagai pihak dalam menggunakan teritorial bersama, hal ini masih belum terpecahkan.

MENGAMBIL MANFAAT DARI PELUANG PJL: ISU-ISU UTAMA

Pengalaman-pengalaman yang disebutkan di atas beragam, mulai dari kehutanan di UZACHI hingga ke wanatani berbasis pertanian dalam Dana BioKlimatik dan opsi wisata para mantan nelayan di Mazunte dan Ventanilla. Terlepas dari keragamannya, kasus-kasus tersebut menyajikan gambaran beberapa peluang untuk menjadikan PJL sebagai sebuah mekanisme untuk memperkuat ekonomi petani. Analisa perbandingan dari berbagai pengalaman tersebut dilakukan oleh Burstein, et.el. (2002) yang menyoroti sejumlah isu untuk dibahas demi mewujudkan kemungkinan tersebut. Isu-isunya yaitu:

- Pentingnya mengembangkan suplai, berawal dari yang sudah ada dan juga memperkuat permintaan.

- Perlunya kerjasama strategis antara masyarakat atau organisasi petani dengan organisasi mediator yang mendukung melalui riset, bimbingan teknis, sertifikasi, penggalangan dana, promosi, dan penjualan.

- Peran penting kapasitas masyarakat untuk organisasi dan aksi bersama sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan, mengelola konflik, strategi yang tepat, dan memastikan pengelolaan lahan yang menjamin penyediaan jasa lingkungan.

- Perlunya kerangka institusional dan kebijakan publik yang mendukung.

TITIK AWAL: AKSES SUMBERDAYA ALAM YANG LUAS

PJL potensial untuk masyarakat pedesaan Meksiko dalam sistem sewa lahan suatu keunikan di negara-negara Amerika dengan pemikiran bahwa penduduk lokal dan petani memiliki akses luas dan kontrol terhadap lokasi sumberdaya alam. Dengan kondisi ini, saat akses luas ke lokasi sumberdaya terpenuhi, studi kasus Meksiko menekankan dimensi penting lainnya untuk inisiatif PJL yang mendiversifikasikan dan memperkuat strategi penghidupan petani dan penduduk lokal.

MENINGKATKAN SUPLAI DARI STRATEGI YANG TELAH ADA DAN MEMPERKUAT PERMINTAAN

Menurut Burstein, et.al. (2002), PJL memperlihatkan peluang dan resiko bagi masyarakat petani. Mereka menyebutkan beberapa resiko yang ada seperti ketidakamanan dan ketidakstabilan lokasi pasar, perlunya masuk ke dalam rantai perantara yang rapuh ketika berhadapan dengan pasar internasional , dan biaya transaksi yang tinggi dibandingkan dengan para pemilik lahan luas. Di antara peluang-peluang yang ada, mereka beranggapan bahwa PJL dapat membangkitkan alternatif ekonomi pelengkap. Selain itu, PJL juga mendorong bentuk-bentuk keberlanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang mendiversifikasikan pilihan-pilihan produktif dengan mempromosikan, sebagai contoh, perubahan dari pertanian menjadi kehutanan pada lahan-lahan yang secara ekologis rapuh. Terakhir, PJL juga dapat memberikan kekuatan pada masyarakat petani dengan mengakui nilai tambah dari pekerjaan mereka yang menunjang konservasi lingkungan.

Dalam setiap kesempatan, mereka mengingatkan bahwa PJL, lebih dari sekedar menggantikan kegiatan yang ada, menunjukkan suatu peluang tambahan untuk mendiversifikasikan strategi penghidupan. Ituah sebabnya disarankan untuk mengembangkan suplai jasa lingkungan dimulai dari strategi produksi yang telah berjalan. Sebagai contoh, para petani dapat memperluas kegiatan wanatani untuk rosot karbon, pengaturan air, atau memasarkan jasa lingkungan berkaitan dengan hasil panen yang telah ada (kasus kopi tumbuh di naungan yang berwawasan keragaman hayati). Selanjutnya, dari pada fokus ke pasar jasa lingkungan global (misalnya rosot karbon), mereka menganjurkan untuk memberikan prioritas pada pengembangan pasar lokal dan nasional untuk jasa-jasa air dan ekowisata.

Dimensi penting lainnya yaitu perlunya memperkuat permintaan terhadap jasa lingkungan. Hal ini menekankan pentingnya pemasaran serta peranan dalam menciptakan